

BAB II

DAKWAH DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.1 Pengertian Aktivitas Dakwah

Aktivitas adalah keaktifan; kegiatan yang dilaksanakan di tiap bagian di dalam organisasi atau perusahaan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:).

Makna aktivitas menurut ilmu manajemen adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan dengan sedemikian rupa, sehingga mampu bekerja dengan ikhlas demi terciptanya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Ilaihi, 2006; 28).

Ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab , yaitu *da'a- yad'u- da'watan*, artinya mengajak, menyeru, memanggil.

Warson munawir, menyebutkan bahwa dakwah artinya adalah memanggil (*to call*), mengundang (*to invite*), mengajak (*to summon*), menyeru (*to propose*), mendorong (*to urge*) dan memohon (*to pray*) (Amin, 2009: 1).

Dakwah Islam adalah kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan *bashirah* untuk meniti jalan Allah dan *istiqomah* di jalanNya serta berjuang bersama meninggikan agama Allah (Munir, 2009: 18).

Jadi, aktivitas dakwah merupakan usaha atau kegiatan mengajak dan memotivasi manusia dengan cara bijaksana untuk taat kepada Allah SWT dengan cara berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran serta menjalankan syari'at Islam yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan (*istiqomah*) dengan tujuan agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Usaha atau aktivitas dakwah yang dilaksanakan dalam rangka dakwah itu merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan sengaja. Arti proses adalah rangkaian perbuatan yang mengandung suatu maksud tertentu, yang memang dikehendaki oleh pelaku dari perbuatan itu. Sebagai suatu proses, usaha atau aktivitas dakwah tidaklah mungkin dilaksanakan secara sambil lalu dan seingatnya saja. Melainkan harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang, dengan memperhitungkan segenap segi dan faktor yang mempunyai pengaruh bagi pelaksanaan dakwah. Demikian pula suatu proses, usaha atau aktivitas dakwah tidak mungkin diharapkan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya dengan hanya melakukan sekali perbuatan saja. Tetapi harus melakukan serangkaian atau serentetan perbuatan yang disusun secara tahap demi tahap, dengan sasarannya masing-masing yang ditetapkan secara rasional pula. Penetapan sasaran secara rasional mengandung arti bahwa sasaran itu harus objektif sesuai dengan kondisi dan situasi, baik yang melingkupi diri pelaku, maupun obyek dakwah serta faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam proses dakwah. Penetapan sasaran yang tidak rasional, sering hanya akan mendatangkan kekecewaan saja, oleh karena tidak pernah berhasil dapat dicapai (Shaleh, 1977: 21).

1.1.1 Unsur-Unsur Dakwah

Dalam suatu aktivitas dakwah yang berupa ajakan, melahirkan suatu proses penyampaian, paling tidak terdapat beberapa elemen yang harus ada (Amin, 2009: 13).

Elemen-elemen atau unsur-unsur dakwah tersebut adalah *Da'i* (Pelaku Dakwah), *Mad'u* (Penerima Dakwah), *Kaifiyah Ad-Da'wah* (Metode Dakwah), *Washilah Ad-Da'wah* (Media Dakwah), *Maddatud Da'wah* (Materi Dakwah).

1. *Da'i* (Pelaku Dakwah)

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau organisasi/lembaga.

Da'i harus mengetahui harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi, terhadap problema yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihidirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng (Munir, 2009: 22).

2. *Mad'u* (Penerima Dakwah)

Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam atau tidak; atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam dan ikhsan (Munir, 2009: 3).

3. *Kaifiyah Ad-Da'wah* (Metode Dakwah)

Metode dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah, baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaklah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi mad'u sebagai penerima pesan-pesan dakwah. Sudah selayaknya penerapan metode dakwah mendapat perhatian yang serius dari para penyampai dakwah. Berbagai pendekatan dakwah, baik *dakwah bil al-lisan*, *dakwah bi al-qalam* (dakwah melalui tulisan, media cetak), maupun *dakwah bi al-hal* (dakwah dengan amal nyata, keteladanan) perlu dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan modernitas. Demikian pula menggunakan metode dakwah dengan *Hikmah*, *Mauidzah Hasanah*, dan *Mujadalah*.

4. *Washilah Ad-Da'wah* (Media Dakwah)

Media dakwah adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Penggunaan media dakwah yang tepat akan menghasilkan dakwah yang efektif. Penggunaan media-media dan alat-alat modern bagi pengembangan dakwah adalah suatu keharusan untuk mencapai efektivitas dakwah. Media-media yang dapat digunakan dalam aktivitas dakwah antara lain: media-media tradisional, media-media cetak, media broadcasting, media film, media audio-visual, internet, maupun media elektronik lainnya.

5. *Maddatud Da'wah* (Materi Dakwah)

Materi dakwah adalah isi dari pesan-pesan dakwah Islam. Pesan atau materi dakwah harus disampaikan secara menarik, tidak monoton sehingga merangsang objek dakwaha akan mengkaji lebih mendalam mengenai materi agama Islam dan meningkatkan kualitas pengetahuan keIslaman untuk pengalaman keagamaan objek dakwah (Amin, 2009: 14).

2.1.2 Macam-Macam Dakwah

Menurut Abdul Hakim Mahfud dakwah dapat dibagi menjadi dua:

a. Dakwah Fardiyah (Dakwah Personal)

Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilakukan oleh da'i secara personal. Dakwah fardiyah dipahami sebagai ajakan atau seruan ke jalan Allah SWT yang dilakukan oleh da'i kepada orang lain secara personal dengan tujuan mengubahnya menjadi lebih baik dan diridhai Allah SWT.

b. Dakwah Jama'i (Dakwah Kolektif)

Dakwah Jama'i adalah dakwah yang dilakukan oleh komunitas da'i. Dalam konteks ini, Al Quran dalam beberapa tempat sering kali menyebut "*da'i*" dengan istilah "*ummah*" yang berarti "*komunitas*" dan menyebutnya dengan kata ganti "*tum*" yang berarti "*kalian*" yang banyak. Term "*ummah*" dan "*tum*" dalam Bahasa Arab ini merujuk kepada suatu kelompok orang atau komunitas yang terdiri dari beberapa personal. Istilah Al Quran ini dapat mengimplementasikan

bahwa efektifitas dakwah ini sangat dipengaruhi oleh manajemen dakwah secara kolektif. Dakwah yang dilakukan oleh para da'i kolektif lebih terorganisir dan peluang suksesnya lebih besar dari pada dakwah yang dilakukan oleh seorang diri (Safrodin, 2008: 33).

2.1.3 Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah sebagai bagian dari seluruh aktivitas dakwah sama pentingnya dengan unsur-unsur lain, seperti subjek dan obyek dakwah, metode dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu tujuan dakwah sangat menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media dakwah, sasaran dakwah sekaligus strategi dakwah juga berpengaruh olehnya (Amin, 2009: 59).

Tujuan dakwah dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Tujuan Umum

Tujuan dakwah secara umum adalah menyelamatkan umum manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang-benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dan lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada *tauhid* yang menjanjikan kebahagiaan.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, dakwah juga memiliki tujuan secara khusus yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan, sehingga terwujud masyarakat

yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh.

- b. Terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai, dan sejahtera di bawah limpahan rahmat karunia dan ampunan Allah SWT.
- c. Mewujudkan sikap beragama yang benar dari masyarakat (Pimay, 2006: 11).

2.2 Manajemen Dakwah

Manajemen dakwah adalah proses merencanakan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas itu. Kemudian menggerakannya ke arah pencapaian tujuan dakwah yang diinginkan (Amin, 2009: 228).

Sebuah organisasi atau lembaga dakwah membutuhkan manajemen untuk mengatur, dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan-tujuannya. Karena dengan adanya manajemen, maka terdapat mekanisme yang menjamin untuk menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan hasil baru sesuai dengan proses yang teratur. Dengan manajemen suatu kegiatan dapat diselesaikan dengan kewajiban-kewajiban sebagai ganti dari tugas sebelumnya. Sebuah organisasi atau aktivitas jika dilaksanakan dengan manajemen dapat diketahui secara utuh kapasitas kemampuannya dan menunjukkan jalan yang paling utuh untuk mewujudkan tujuan-tujuannya (Munir, 2009: 82).

Adapun kegunaan dari manajemen dakwah secara teoritis dan praktis dapat dilihat sesuai dengan fungsi manajemen itu sendiri, fungsi manajemen menurut George Terry (1981), terdiri atas: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan) (Kayo, 2007: 31).

2.2.1 Pengertian Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya lainnya (*other resources*) untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2007: 42).

Perencanaan adalah fungsi dasar dari manajemen, sebab tanpa adanya perencanaan tidak mungkin ada fungsi-fungsi lain (Siagian, 1993:71).

Dalam aktivitas dakwah, perencanaan dakwah bertugas menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana-prasarana atau media dakwah, serta personel da'i yang akan diterjunkan. Menentukan materi yang cocok untuk sempurnanya pelaksanaan, membuat asumsi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat mempengaruhi cara pelaksanaan program dan cara menghadapinya serta menentukan alternatif-alternatif, yang semua itu merupakan tugas utama dari sebuah perencanaan (Munir, 2009: 99).

a. Manfaat Perencanaan

Perencanaan merupakan sesuatu yang sangat urgen dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan dakwah, yaitu:

- a) Untuk mengatur aktivitas dakwah secara sistematis dan terkoordinir guna memudahkan dan mengefektifkan usaha-usaha pencapaian tujuan dakwah.
- b) Untuk memperoleh gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan masa depan kehidupan umat beragama.
- c) Memberikan landasan untuk melakukan pengawasan kerja dakwah dan penilaian atas hasil-hasil yang sudah dikerjakan.
- d) Mendorong seseorang untuk memperoleh prestasi kerja dan profesi yang sebaik-baiknya.
- e) Memberikan kemungkinan pengembangan strategi dakwah secara efektif dan efisien (Amin, 2009: 232).

b. Kelemahan Perencanaan

Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak, ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan, antara lain:

- a) Perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan. Usaha-usaha perencanaan yang sifatnya formal itu dapat mengunci sebuah organisasi ke sasaran-sasaran tertentu yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu.

- b) Rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis. Sebab bagaimanapun juga sebuah organisasi pada era sekarang akan menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis.
- c) Rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas.
- d) Rencana memusatkan perhatian para manajer pada persaingan. Perencanaan formal memperkuat sukses yang bisa menjerumus pada kegagalan (Munir, 2009:116).

2.2.2 Pengertian Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu (Manulang, 1983: 22).

Pengorganisasian atau *al-thanzim* dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis (Munir, 2009: 117).

a. Langkah-Langkah Pengorganisasian

Dalam organisasi dakwah terdapat empat langkah yang harus ditempuh, yaitu:

- a) Membagi-bagi pekerjaan atau tindakan dakwah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

- b) Menetapkan dan mengelompokkan orang atau para da'i dalam melaksanakan tugasnya.
- c) Menetapkan tempat atau lingkungan di mana aktivitas dakwah itu akan dikerjakan.
- d) Menetapkan jalinan kerja sama antara para da'i sebagai suatu kesatuan kelompok kerja (Amin, 2009: 233).

b. Desain Pengorganisasian

Desain pengorganisasian tergantung atas tiga komponen, yaitu strategi, teknologi, dan derajat ketidakpastian lingkungan organisasi tersebut. Desain sebuah pengorganisasian dakwah itu terdiri dari:

a) Organisasi yang Mekanis

Struktur organisasi mekanik adalah sebuah struktur organisasi yang dicirikan oleh spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang tertulis, dan partisipasi yang kecil dalam pengambilan keputusan dan pekerja di bawahnya.

b) Organisasi Organik

Organisasi organik adalah suatu pengorganisasian yang sangat adaptif dan fleksibel dengan spesialisasi kerja yang sedikit, formalisasi, yang minimal, dan supervisi langsung ke para pekerja junior (Munir, 2009: 133).

2.2.3 Pengertian Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini, pemimpin menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas dakwah yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terealisasi, di mana fungsi manajemen akan bersentuhan dengan para pelaku dakwah. Selanjutnya dari sini juga proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atau penilaian akan berfungsi secara efektif (Munir, 2009: 139).

a. Tahap-Tahap Penggerakan

Ada beberapa poin dari proses penggerakan dakwah yang menjadi kunci dari kegiatan dakwah, yaitu:

a) Pemberian Motivasi

Pemberian motivasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pimpinan dakwah dalam rangka pergerakan dakwah. Pada pelaksanaan dakwah, timbulnya kesediaan untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah serta tetap terpeliharanya semangat pengabdian, adalah karena adanya dorongan atau motivasi tertentu. Sesuai dengan sifat usaha dakwah yang didukungnya, yang tidak lain adalah dakwah Islam seharusnya motivasi yang mendorong para pelaku dakwah itu hanyalah semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT.

b) Bimbingan

Pembimbingan merupakan tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah yang sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan, agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dakwah dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksana dakwah dilakukan dengan jalan memberikan perintah atau petunjuk serta usaha-usaha lainnya yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Atas dasar ini maka usaha dakwah akan berjalan dengan baik dan efektif bila pimpinan dakwah dapat memberikan perintah dan bimbingan yang tepat, di samping itu diperlukan kesadaran dari pada pelaksana dakwah untuk melakukan perintah pimpinan dakwah dengan sebaik-baiknya.

c) Penjalinan Hubungan

Untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dakwah diperlukan adanya penjalinan hubungan, di mana para petugas atau pelaksana dakwah yang ditempatkan dalam berbagai bagian dapat dihubungkan satu sama lain, agar mencegah terjadinya kekacauan kesamaan dan sebagainya.

d) Penyelenggaraan Komunikasi

Komunikasi sangat penting sekali bagi kelancaran proses dakwah, antara pimpinan dakwah dan pelaksana dakwah. Proses dakwah akan terganggu bahkan mengalami kemacetan dan menjadi berantakan, bila timbul ketidakpercayaan dan saling mencurigai antara pimpinan dakwah dengan pelaksana dakwah

Demikian juga jika pimpinan tidak mempercayai pelaksana, maka mereka enggan menyerahkan tugas-tugas kepada para pelaksana, dan pelaksana tidak mempercayai pimpinan atau sesama pelaksana dakwah, maka akibatnya proses dakwah tidak berjalan efektif (Saputra, 2011: 305).

e) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

2.2.4 Pengertian Pengawasan/Pengendalian (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu bagian dari *enterprise* yang justru menjawab pertanyaan, apakah para manajer telah berhasil atau tidak dalam pekerjaannya yaitu “*managing the enterprise, managing the work and managing the people*” (Panglaykim, 1981: 175).

Pengawasan adalah upaya agar tindakan yang dilaksanakan terkendali dan sesuai dengan instruksi, rencana, petunjuk-petunjuk serta ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diterapkan bersamaan. Pengendalian atau pengawasan pelaksanaan dakwah pada hakikatnya dilaksanakan untuk mengawasi dan mengetahui sampai di mana usaha dakwah yang sudah dilakukan oleh setiap tenaga da'i sejalan dengan tugas-tugas yang telah diberikan (Amin, 2009: 234).

a. Elemen-Elemen Pengendalian

Dalam setiap sistem pengendalian, terdapat empat elemen pokok yang satu sama lain berlangsung dalam urutan yang kronologis dan kontinu serta di antara keempat elemen pokok tersebut berhubungan. Keempat elemen pokok pengendalian yang dimaksud adalah:

- a) Kondisi atau karakteristik yang dikendalikan.
- b) Instrumen atau metode sensor untuk mengukur kondisi atau karakteristik yang dikendalikan.
- c) Kelompok, unit, atau instrumen kendali yang akan membandingkan data yang diukur dengan pekerjaan yang direncanakan dan mengarahkan mekanisme perbaikan untuk memenuhi kebutuhan.
- d) Kelompok atau mekanisme yang bergerak dan mampu mengadakan inovasi dalam setiap operasi (Siswanto, 2007: 142).

b. Tujuan Pengawasan

Diadakannya evaluasi atau pengawasan dalam pelaksanaan dakwah ini bertujuan, antara lain:

- a) Untuk mengidentifikasi sumber daya dakwah yang potensial dalam sebuah spesifikasi pekerjaan manajerial.
- b) Untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagin individu dan kelompok dalam sebuah lembaga dakwah.
- c) Untuk mengidentifikasi para anggota yang akan dipromosikan dalam penempatan posisi tertentu.
- d) Untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya dalam kegiatan dakwah.
- e) Untuk memudahkan memecahkan problematika dakwah yang terjadi di lapangan.
- f) Agar dakwah dapat mencapai target sasaran (*maqoshid al dakwah*) sesuai dengan yang telah direncanakan (Saputra, 2011: 310).

2.3 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga

Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan).

2.3.1 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu tujuan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan para narapidana untuk dapat hidup kembali secara wajar di tengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan narapidana, begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan status narapidana ataupun mantan narapidana seringkali disikapi secara ekstrim atau berlebihan oleh masyarakat, termasuk cara mereka memperlakukannya. Kondisi ini lambat laun akan mempengaruhi cara pandang (konsep diri) narapidana sendiri terhadap dirinya (Rosidi, 2010: 1).

Kalau diperhatikan tujuan dari pidana penjara adalah:

1. Pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.
2. Penjeraan, untuk memberi contoh orang banyak agar tidak berbuat kejahatan.
3. Rehabilitasi, mencari sebab-sebab kejahatan dengan meneropong orang jahat itu sendiri.

Adapun tujuan Pemasyarakatan ialah supaya narapidana itu menjadi baik dan setelah habis menjalani pidananya supaya tidak lagi melanggar hukum. Di samping itu, supaya mereka turut aktif membangun negara, karena bila tidak bisa mereka itu menjadi parasit, bahkan bisa melanggar hukum lagi dan menjadi residivis.

Diharapkan juga setelah menjalani masa pidananya itu mantan narapidana sanggup menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup dalam mewujudkan yang adil dan makmur.

Lebih jauh lagi tujuan Pemasyarakatan adalah agar para tuna warga mentaati ajaran-ajaran dan aturan-aturan agamanya, baik semasa menjalani masa pidananya maupun setelah habis menjalani masa pidana.

Setelah tercapainya kemerdekaan negara kita mempunyai pandangan hidup yang berfalsafah dan berdasarkan Pancasila/ UUD '45. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap bentuk dan pelaksanaan pidana, sehingga pidana penjara dan pidana kurungan dianggap sudah tidak sesuai lagi (Lubis, 1978: 20).

2.3.2 Sistem Pemasyarakatan

Pada konferensi para ahli pemasyarakatan tanggal 27 April 1964 dihasilkan suatu perubahan sistem, yaitu dari kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan.

Berdasarkan sistem kepenjaraan narapidana dibina secara tertutup, tetapi berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaan narapidana tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Sekalipun narapidana itu dicabut

kemerdekaannya, dimasukkan dalam lembaga, tetapi kedudukannya sebagai anggota masyarakat tidak hilang. Oleh karena itu dalam pembinaannya narapidana tersebut tidak boleh dipisahkan dengan masyarakat. Bagi narapidana yang masih membahayakan dibina secara terpisah dari masyarakat, sampai ia tidak membahayakan masyarakat lagi. Pemasyarakatan itu bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan pelanggar-pelanggar hukum, dan dengan demikian tidak menjadikan narapidana hanya sebagai obyek semata-mata (Lubis, 1978: 20).

2.3.3 Narapidana

Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karena tindak pidana; atau terhukum).

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik (<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertiannarapidana.html>).

Jadi, narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat

yang telah mendapat keputusan pengadilan (Hakim). Tujuan dari hukuman ini ialah untuk menjerakan dan melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya. Pelaksanaan hukuman itu berbentuk melakukan penutupan paksa dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lubis, 1978: 13).